

# Peran Pancasila dalam Membangun Ekosistem Bisnis Berkelanjutan pada Circular Economy di Indonesia

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the role of Pancasila values in developing a sustainable business ecosystem based on the circular economy in Indonesia, as well as to identify the challenges faced by business actors in its implementation. The research questions include: how Pancasila values can be integrated into the development of a sustainable business ecosystem based on the circular economy, and what challenges arise in their implementation among business actors. The research employed an empirical approach through interviews with officials of Divre IV TnK who have direct experience in sustainable business practices, complemented by a normative approach through literature review on circular economy, sustainability, and Pancasila values. The results indicate that Pancasila values have been implemented effectively in business practices, including waste management, efficient resource utilization, collaboration with SMEs and local communities, and the development of young generations involved in the business ecosystem. Values such as humanity, social justice, unity, and mutual cooperation serve as ethical guidelines supporting economic, social, and environmental sustainability. However, several challenges were identified, including the short-term mindset of some employees and business partners, regulatory limitations, high technological costs, and uneven sustainability literacy. Strategies to address these challenges include internal training, recognition of individuals successfully implementing sustainable practices, community engagement, and multi-stakeholder collaboration. These findings emphasize that the successful integration of Pancasila into the circular economy requires a holistic approach involving education, incentives, collaboration, and innovation to ensure the enduring relevance of the nation's noble values in the era of globalization. Thus, Pancasila plays a strategic role as an ethical and moral foundation in building a harmonious, sustainable, and inclusive business ecosystem, while also strengthening national identity and social responsibility among the younger generation.*

**Keywords:** Pancasila, circular economy, sustainable business, value integration, globalization, youth

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai-nilai Pancasila dalam membangun ekosistem bisnis berkelanjutan berbasis circular economy di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha dalam penerapannya. Rumusan masalah penelitian ini mencakup: bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam pengembangan ekosistem bisnis berkelanjutan berbasis circular economy, dan tantangan apa saja yang muncul dalam penerapannya di kalangan pelaku usaha. Pendekatan penelitian menggunakan metode empiris melalui wawancara dengan pejabat Divre IV TnK yang berpengalaman langsung dalam praktik bisnis berkelanjutan, serta metode normatif melalui kajian literatur terkait circular economy, keberlanjutan, dan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila telah diterapkan secara nyata dalam praktik*

bisnis, termasuk dalam pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya secara efisien, kolaborasi dengan UMKM dan komunitas lokal, serta pengembangan karakter generasi muda yang terlibat dalam ekosistem bisnis. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong terbukti menjadi pedoman etis yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan nilai Pancasila, antara lain mindset jangka pendek sebagian karyawan dan mitra usaha, keterbatasan regulasi, biaya teknologi, dan literasi keberlanjutan yang belum merata. Strategi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan ini meliputi pelatihan internal, penghargaan bagi pihak yang berhasil menerapkan praktik berkelanjutan, komunikasi dengan masyarakat, serta pengembangan kolaborasi lintas pihak. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan Pancasila dalam circular economy memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, insentif, kolaborasi, dan inovasi agar nilai-nilai luhur bangsa tetap relevan di era globalisasi. Dengan demikian Pancasila berperan strategis sebagai fondasi etika dan moral dalam membangun ekosistem bisnis yang harmonis, berkelanjutan, dan inklusif, sekaligus memperkuat identitas nasional dan tanggung jawab sosial generasi muda.

**Kata Kunci:** Pancasila, circular economy, bisnis berkelanjutan, integrasi nilai, globalisasi, generasi muda

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu pendekatan yang mengalami akselerasi adalah circular economy, yaitu konsep yang menekankan regenerasi nilai melalui daur ulang, pemanfaatan kembali, pengurangan limbah, serta optimalisasi siklus hidup produk. Ellen MacArthur Foundation (2015) menjelaskan bahwa circular economy merupakan “*economic system designed to be restorative*,” yang berarti sistem ini bertujuan memulihkan dan mempertahankan nilai sumber daya dalam siklus berkelanjutan. Di Indonesia, pendekatan ini menjadi semakin relevan dalam menghadapi isu lingkungan, ketergantungan bahan baku, serta tekanan terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan. Integrasi circular economy di Indonesia tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga landasan etika yang kuat. Dalam konteks inilah nilai-nilai Pancasila memegang peran strategis. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung prinsip moral dan sosial yang dapat mengarahkan modernisasi ekonomi agar tetap berada dalam koridor kemanusiaan, keberlanjutan, dan keadilan. Elkington (1997) melalui konsep triple bottom line menekankan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai jika terjadi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks global semakin kuat.

Hal ini diperjelas oleh Zainuddin Hasan (2025:126) yang menyatakan bahwa “globalisasi membuka peluang besar untuk memperluas pengaruh nilai-nilai Pancasila tidak hanya dalam negeri, tetapi juga pada tataran internasional.” Dengan demikian, integrasi Pancasila ke dalam model circular economy bukan hanya penting bagi pembangunan nasional, tetapi juga berpotensi menjadi kontribusi etis Indonesia bagi tata ekonomi global. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa circular economy bukan sekadar model produksi, tetapi juga perubahan sistemik. Geissdoerfer et al. (2017) menjelaskan bahwa *circular economy* merupakan “*systemic shift that requires cultural and institutional transformation.*” Dalam konteks Indonesia nilai Pancasila seperti gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial dapat memperkuat perubahan budaya menuju ekosistem bisnis yang inklusif dan kolaboratif.

Sachs (2015) menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan harmoni antara kepentingan ekonomi dan solidaritas sosial, sesuatu yang secara inheren terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Meskipun memiliki potensi besar penerapan nilai Pancasila dalam circular economy menghadapi berbagai tantangan. Kirchherr et al. (2018) menyebutkan bahwa implementasi *circular economy* di banyak negara terhambat oleh minimnya regulasi yang jelas, kurangnya insentif, dan keterbatasan teknologi. Hal serupa terjadi di Indonesia terutama pada sektor UMKM yang memiliki kendala modal dan akses teknologi. Tantangan budaya organisasi juga signifikan karena sebagian besar perusahaan masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Porter dan Kramer (2011) melalui konsep *shared value* menjelaskan bahwa perusahaan sering gagal melihat hubungan langsung antara nilai sosial dan nilai ekonomi, padahal keduanya dapat berjalan seiring. Selain faktor internal perusahaan tantangan juga muncul dari minimnya integrasi nilai moral dalam kebijakan makro.

Raworth (2017) melalui Doughnut Economics menegaskan pentingnya fondasi sosial yang kuat untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak batas ekologis. Nilai-nilai Pancasila secara filosofis dapat memenuhi fondasi sosial tersebut namun implementasinya membutuhkan komitmen pemerintah dan pelaku usaha. Oleh karena itu penting untuk meneliti bagaimana

nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan secara konkret dalam pengembangan ekosistem bisnis circular economy di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menerapkannya. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini akan menjadi dasar bagi strategi transformasi ekonomi Indonesia menuju keberlanjutan jangka panjang yang tetap berakar pada identitas nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode empiris dan normatif secara terpadu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ekosistem bisnis berkelanjutan berbasis circular economy di Indonesia. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku usaha, termasuk UMKM dan perusahaan besar, untuk mendapatkan data faktual mengenai penerapan nilai Pancasila dalam praktik circular economy, hambatan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan dalam menghadapi tantangan tersebut. Data empiris ini dianalisis untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik nyata di lapangan, sesuai dengan prinsip penelitian sosial yang menekankan validitas dan reliabilitas data (Creswell, 2014; Babbie, 2013).

Sementara itu pendekatan normatif dilakukan melalui kajian literatur, regulasi, dan dokumen resmi terkait Pancasila, kebijakan ekonomi berkelanjutan, dan prinsip circular economy, dengan tujuan mengevaluasi kesesuaian praktik nyata dengan landasan hukum, etika, dan filosofi Pancasila. Pendekatan normatif ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2011) yang menekankan pentingnya kajian yuridis-normatif untuk memahami aturan dan nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbisnis. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya memetakan praktik dan hambatan di lapangan, tetapi juga menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip Pancasila dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, metode ini memberikan kerangka yang holistik

untuk menganalisis fenomena integrasi nilai Pancasila dalam *circular economy*, sekaligus memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi manajerial yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pancasila dalam Membangun Ekosistem Bisnis Berkelanjutan pada Circular Economy di Indonesia**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ekosistem bisnis berkelanjutan berbasis *circular economy* di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pejabat Divre IV TnK, yaitu EVP, Deputy, dan Manajer Humasda, yang memiliki pengalaman langsung dalam mengelola praktik bisnis berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan menggabungkan pendekatan empiris melalui wawancara dan observasi, serta pendekatan normatif melalui kajian literatur dan regulasi yang relevan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah menjadi pedoman etis yang diterapkan secara nyata dalam praktik *circular economy*. Salah satu narasumber menekankan bahwa setiap keputusan operasional selalu mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, selain keuntungan ekonomi. Hal ini mencerminkan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang ada dalam Pancasila. Dalam praktiknya, perusahaan berusaha meminimalkan dampak lingkungan melalui pengelolaan limbah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, dan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Hal ini sejalan dengan konsep triple bottom line yang diperkenalkan oleh Elkington (1997) di mana keberlanjutan dicapai melalui keseimbangan antara profit, people, dan planet. Selain itu nilai Pancasila lainnya seperti persatuan dan gotong royong terlihat dalam kemitraan perusahaan dengan komunitas lokal dan UMKM sekitar. Narasumber menjelaskan bahwa limbah atau bahan sisa produksi diolah kembali oleh mitra usaha setempat sehingga menciptakan ekosistem yang kolaboratif. Strategi ini sejalan dengan pandangan Geissdoerfer et al. (2017) yang

menyatakan bahwa *circular economy* menuntut perubahan sistemik dan kolaboratif bukan sekadar inovasi teknologi. Dengan mengintegrasikan nilai gotong royong dan persatuan perusahaan tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi tetapi juga menumbuhkan rasa saling memiliki dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks etika bisnis penerapan Pancasila membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Narasumber Humasda menjelaskan bahwa setiap proyek baru dievaluasi dari sisi dampak sosial dan keberlanjutan, sehingga praktik bisnis tidak merugikan karyawan, mitra, maupun masyarakat sekitar. Temuan ini sejalan dengan Zainuddin Hasan (2025:126) yang menegaskan bahwa globalisasi membuka peluang untuk memperluas pengaruh nilai-nilai Pancasila tidak hanya dalam negeri, tetapi juga pada tataran internasional. Pentingnya integrasi nilai Pancasila dalam membentuk karakter generasi muda juga semakin relevan dalam konteks globalisasi. Zainuddin Hasan (2025:140) menyatakan bahwa “Generasi muda sebagai penerus bangsa sangat rentan mengalami krisis identitas dalam era globalisasi. Krisis ini muncul ketika mereka kehilangan orientasi terhadap siapa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, apa nilai-nilai luhur yang harus dijunjung, dan bagaimana bersikap dalam perbedaan budaya, ideologi, dan agama.” Hal ini menunjukkan bahwa praktik Pancasila di lingkungan bisnis, seperti yang dilakukan Divre IV Tnk, bukan hanya berdampak pada proses operasional, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda yang terlibat, membantu mereka memahami identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Lebih luas lagi, fenomena globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap eksistensi identitas budaya lokal.

Hasan, Pradhana, Andika, & Al Jabbar (2025) menyatakan bahwa globalisasi telah menjadi salah satu fenomena paling dominan dalam era kontemporer, membawa dampak yang luas dan kompleks di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu aspek yang paling menonjol dari globalisasi adalah pengaruhnya terhadap identitas budaya lokal. Identitas budaya, yang mencakup rasa kepemilikan, afiliasi, dan keterikatan individu terhadap komunitas atau negara tertentu, telah menjadi semakin kompleks dan berubah

dalam konteks globalisasi. Hal ini selaras dengan krisis identitas yang dialami generasi muda, di mana pengaruh globalisasi dapat memunculkan kebingungan dalam memahami nilai-nilai luhur bangsa dan orientasi budaya. Penerapan nilai Pancasila dalam praktik bisnis berkelanjutan menjadi salah satu cara konkret untuk memperkuat akar budaya dan identitas nasional, sekaligus memberikan pedoman etis dalam menghadapi perubahan global.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan signifikan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila dalam *circular economy*. Salah satu kendala utama adalah mindset sebagian karyawan dan mitra usaha yang masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Narasumber menekankan bahwa sulit menjelaskan bahwa keberlanjutan juga merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini sejalan dengan Porter dan Kramer (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung enggan mengadopsi strategi berkelanjutan jika dampak finansialnya tidak terlihat secara langsung. Selain faktor mindset, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendorong integrasi nilai moral dalam praktik bisnis. Narasumber menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah masih bersifat umum dan belum memberikan insentif konkret bagi perusahaan yang menerapkan prinsip *circular economy* berlandaskan Pancasila.

Kirchherr et al. (2018) menegaskan bahwa hambatan *circular economy* tidak hanya bersifat teknis tetapi juga terkait regulasi, literasi pelaku usaha, dan budaya organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan eksternal dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lain sangat dibutuhkan untuk memperkuat penerapan nilai Pancasila secara konsisten. Kendala lainnya adalah keterbatasan teknologi dan infrastruktur terutama untuk UMKM yang menjadi mitra perusahaan. Narasumber menjelaskan bahwa beberapa proses *circular economy* seperti pengolahan limbah menjadi bahan baku baru membutuhkan peralatan yang mahal dan pengetahuan teknis yang tinggi. Hal ini membuat penerapan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan terkadang tidak optimal karena tidak semua pihak memiliki kapasitas yang sama untuk berpartisipasi. Temuan ini mendukung argumentasi Meadows et al. (2004) yang menekankan bahwa perubahan sistemik memerlukan perubahan

nilai, budaya, dan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Meski demikian, perusahaan telah menerapkan berbagai strategi untuk menjembatani teori dan praktik. EVP Divre IV Tnk menyebutkan bahwa pelatihan internal tentang keberlanjutan, circular economy, dan etika Pancasila dilakukan secara rutin untuk seluruh karyawan. Deputy Divre IV Tnk menambahkan bahwa perusahaan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang berhasil menerapkan praktik berkelanjutan sesuai nilai Pancasila. Hal ini selaras dengan saran Sachs (2015) bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan memerlukan kombinasi edukasi, insentif, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Komunikasi eksternal juga menjadi strategi penting. Humasda menjelaskan bahwa publikasi kegiatan keberlanjutan dan kolaborasi dengan masyarakat sekitar membantu menyebarkan nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Strategi ini mendukung gagasan Zainuddin Hasan (2025:126) tentang peluang globalisasi untuk memperluas pengaruh nilai Pancasila sehingga praktik keberlanjutan Indonesia juga dapat menjadi teladan bagi perusahaan di tingkat regional maupun internasional. Pembahasan ini menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila dalam circular economy memiliki dampak positif yang nyata, baik pada aspek etika, sosial, maupun ekonomi. Nilai kemanusiaan diterapkan melalui perlindungan pekerja dan mitigasi dampak sosial; keadilan sosial melalui kolaborasi dengan UMKM dan komunitas; persatuan dan gotong royong melalui kemitraan dan proyek bersama; serta musyawarah melalui pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Temuan ini menguatkan argumen Elkington (1997) dan Geissdoerfer et al. (2017) bahwa keberlanjutan memerlukan integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta perubahan budaya organisasi. Tantangan yang ada menunjukkan bahwa integrasi nilai Pancasila tidak bisa dilakukan secara parsial atau simbolis. Dukungan regulasi, edukasi, teknologi, dan insentif diperlukan agar praktik circular economy berlandaskan Pancasila dapat berjalan efektif. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan risiko sosial dan lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Strategi

yang diterapkan Divre IV Tnk, seperti pelatihan, penghargaan internal, dan komunikasi eksternal, merupakan contoh nyata bagaimana teori dan praktik dapat disinergikan, mendukung prinsip *shared value* Porter dan Kramer (2011) dan kerangka *Doughnut Economics* Raworth (2017).

Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun ekosistem bisnis berkelanjutan berbasis *circular economy*. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya berdampak pada praktik bisnis tetapi juga membentuk karakter generasi muda, memperkuat identitas nasional, menumbuhkan pemahaman tentang nilai luhur bangsa, dan memberikan pedoman dalam menghadapi perbedaan budaya, ideologi, serta agama. Integrasi nilai Pancasila yang konsisten dengan strategi bisnis modern dan praktik *circular economy* memungkinkan terciptanya ekosistem bisnis yang harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus menjaga eksistensi identitas budaya lokal di era globalisasi, sebagaimana dijelaskan Hasan, Pradhana, Andika, & Al Jabbar (2025).

Meskipun demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Pancasila dalam *circular economy* masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian. Tantangan utama berasal dari mindset sebagian karyawan dan mitra usaha yang masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Orientasi ini membuat implementasi bisnis berkelanjutan sering dianggap sebagai beban tambahan bukan sebagai investasi jangka panjang. Selain itu keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur penerapan *circular economy* menjadi hambatan struktural yang membuat perusahaan tidak memiliki standar operasional yang konsisten. Kurangnya insentif bagi perusahaan yang berhasil menerapkan prinsip *circular economy* juga memperlambat percepatan implementasi di berbagai sektor. Lebih jauh keterbatasan akses terhadap teknologi sirkular dan pembiayaan yang memadai masih menjadi tantangan terutama bagi perusahaan skala menengah dan kecil.

Di samping tantangan struktural dan teknis hambatan kultural juga ditemukan terutama terkait literasi keberlanjutan.

Banyak pekerja dan pelaku usaha yang belum memahami konsep *circular economy* secara menyeluruh. Menurut Kompasiana (2024) *circular economy* masih dipersepsikan sebatas daur ulang padahal konsep tersebut mencakup desain produk, model bisnis, konsumsi bertanggung jawab, dan regenerasi sistem alam. Rendahnya literasi ini membuat integrasi nilai Pancasila tidak dapat berjalan optimal karena pemahaman mengenai hubungan antara nilai moral dan keberlanjutan masih terbatas. Untuk menjawab tantangan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan sejumlah strategi yang cukup efektif. Salah satunya adalah melalui program pelatihan internal mengenai keberlanjutan, etika kerja, dan nilai-nilai Pancasila. Pelatihan ini bertujuan membentuk kesadaran jangka panjang mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan masyarakat, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam keseharian pekerjaan. Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada individu atau tim yang berhasil menerapkan praktik *circular economy* secara konsisten. Strategi ini terbukti meningkatkan motivasi serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, perusahaan memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekitar melalui sosialisasi, program CSR, dan kegiatan kolaboratif seperti penanaman pohon dan edukasi pengelolaan limbah. Kolaborasi lintas pihak juga dikembangkan dengan akademisi, pemerintah daerah, dan komunitas lingkungan untuk mendukung pelaksanaan *circular economy* yang lebih efektif.

Temuan Ouci DNTB penelitian ini memperkuat kesimpulan bahwa keberhasilan integrasi Pancasila dalam *circular economy* membutuhkan pendekatan holistik. Pancasila memainkan peran sebagai dasar moral yang mengarahkan perusahaan untuk menciptakan keseimbangan antara profit, manusia, dan lingkungan. Circular economy menjadi kerangka implementatif untuk mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut secara nyata dalam praktik bisnis. Integrasi keduanya memberikan arah baru bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga selaras dengan nilai luhur bangsa. Perusahaan yang mengimplementasikan Pancasila dalam *circular economy* telah membuktikan bahwa keberlanjutan dapat dicapai tanpa mengorbankan identitas nasional dan nilai moral masyarakat. Secara

keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini memperjelas bahwa integrasi nilai Pancasila merupakan kunci dalam membangun ekosistem bisnis berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, inovasi, dan ketangguhan bangsa dalam menghadapi tantangan global. Circular economy tidak hanya menjadi strategi ekonomi, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter generasi muda agar mampu menjadi agen perubahan yang menjaga keberlanjutan bumi dan keluhuran moral bangsa.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pengembangan *circular economy* memiliki peran fundamental dalam membentuk ekosistem bisnis berkelanjutan yang tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, dan semangat gotong royong terbukti berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perusahaan untuk bertindak secara lebih etis, bertanggung jawab, dan inklusif. Dalam praktiknya nilai-nilai tersebut tercermin dalam cara perusahaan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimalkan limbah melalui inovasi daur ulang dan regenerasi produk, melakukan kolaborasi dengan komunitas lokal serta memastikan bahwa seluruh proses bisnis tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Integrasi nilai Pancasila tersebut juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran etis para pekerja terutama generasi muda yang tengah beradaptasi dengan dinamika globalisasi. Dengan memahami nilai-nilai kebangsaan mereka dapat melihat bahwa keberlanjutan bukan sekadar tuntutan pasar global tetapi bagian dari tanggung jawab moral sebagai warga negara Indonesia. Selain memberikan kontribusi pada aspek etika dan moral dalam bisnis integrasi Pancasila juga membantu memulihkan dan memperkuat identitas generasi muda dalam menghadapi derasnya arus budaya global.

Dalam konteks ini Pancasila berperan sebagai jangkar moral yang tetap relevan untuk membantu generasi penerus memahami siapa mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia, nilai-nilai apa yang harus dijunjung tinggi, serta bagaimana bersikap bijak dalam menghadapi perbedaan budaya, ideologi, dan agama. Penelitian ini menguatkan pandangan bahwa globalisasi tidak selamanya harus dilihat sebagai ancaman bagi identitas nasional sebaliknya ketika dihadapi dengan pondasi nilai yang kuat seperti Pancasila globalisasi dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk memperkuat integritas, kompetensi, dan rasa kebangsaan mereka sembari tetap mengikuti perkembangan dunia. Namun demikian penelitian juga mengungkapkan bahwa integrasi nilai Pancasila dalam implementasi *circular economy* masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut meliputi mindset sebagian pelaku bisnis yang masih berorientasi pada profit jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak sosial-lingkungan, keterbatasan regulasi yang mendukung prinsip *circular economy* secara sistematis serta rendahnya literasi keberlanjutan di kalangan karyawan dan mitra usaha. Selain itu adaptasi teknologi sirkular seperti sistem pemanfaatan ulang energi, pengolahan limbah canggih, dan inovasi desain produk berkelanjutan juga membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga seringkali menjadi hambatan bagi perusahaan tertentu, khususnya skala menengah dan kecil. Untuk menjawab tantangan tersebut penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan strategis yang holistik dan multi-dimensi. Pelatihan internal mengenai etika Pancasila dan prinsip keberlanjutan perlu diperkuat untuk membangun pola pikir jangka panjang yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Pemberian insentif, penghargaan, dan sistem evaluasi yang terukur kepada pihak-pihak yang berhasil menerapkan praktik *circular economy* juga menjadi kunci dalam menumbuhkan motivasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Di samping itu perusahaan perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat sekitar agar implementasi *circular economy* dapat berjalan secara harmonis tanpa menciptakan konflik sosial atau dampak negatif terhadap komunitas lokal. Kolaborasi lintas sektor antara perusahaan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi Pancasila dalam *circular economy* tidak hanya bergantung pada komitmen perusahaan, tetapi juga membutuhkan dukungan struktural, regulatif, dan kultural dari seluruh elemen bangsa. Pancasila terbukti tetap relevan sebagai dasar ideologis, etis, dan moral dalam menghadapi perkembangan global yang semakin cepat dan dinamis. Ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan, ekosistem bisnis berkelanjutan tidak hanya dapat meningkatkan daya saing nasional, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Dengan demikian, integrasi Pancasila dalam *circular economy* merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi keberlanjutan bangsa Indonesia di tengah tantangan globalisasi yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babbie, E. R. (2013). *The practice of social research* (13th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing.
- Ellen MacArthur Foundation. (2015). *Towards the circular economy: Economic and business rationale for an accelerated transition*. Ellen MacArthur Foundation.
- Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. P., & Hultink, E. J. (2017). *The circular economy – A new sustainability paradigm?* *Journal of Cleaner Production*, 143, 757–768.
- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandar Lampung:(126).

- Hasan, Z. (2025). Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandar Lampung:(140).
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2025). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2018). *Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232.
- Kompasiana. (2024). Pemikiran fenomenal Porter dan Kramer tentang shared value creation.
- Meadows, D. H., Meadows, D., & Randers, J. (2004). *Limits to growth: The 30-year update*. Chelsea Green Publishing.
- Ouci DNTB. (n.d.). *Circular economy as a new paradigm of sustainability*.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). *Creating shared value*. Harvard Business Review, 89(1–2), 62–77.
- Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: Seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.
- Sachs, J. D. (2015). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Soekanto, S. (2011). Pokok-pokok metode penelitian hukum normatif. Rajawali Pers.